

**KONSEP DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019**

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangan)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)	Keterangan
			Dibuka	Ditutup		
1	Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Setda	~UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b ~PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	~Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon ~Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat menghambat penyelesaian proses hukum ~Melanggar HAM ~Menimbulkan persepsi negatif terhadap PNS yang terduga kasus	~Melindungi Data Pribadi PNS yang bersifat rahasia ~Menjaga kerahasiaan kasus	Tidak Terbatas / Kecuali karena ketentuan Undang-Undang	Lebih detail diakomodir pada point nomor 2
2	Dokumen/berkas kepegawaian PNS meliputi : a) Arsip dokumen kepegawaian b) Identitas PNS yang melanggar/ dijatuhi hukuman disiplin c) Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	- Dapat mengungkap rahasia pribadi - Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	- Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas / Kecuali karena ketentuan Undang-Undang	
3	Data Identitas petani yang terintegrasi dengan data BDT (Basis Data Terpadu)	~UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	~Dapat mengungkap rahasia pribadi ~Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	~Terjaga rahasia pribadi petani yang terkategori miskin	Tidak Ditentukan	Tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan (diluar penguasaan Badan Publik)
4	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Dokumen lelang/seleksi dan dokumen kualifikasi)	- UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf b - Perpres 16 Tahun 2018 pasal 7 huruf b - UU No. 5 Th 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Menimbulkan persaingan yang tidak sehat - Terhambatnya Proses Penilaian dokumen	- Perlindungan HKI dan menjaga persaingan usaha yang sehat - Melindungi kerahasiaan perusahaan - Menjaga obyektifitas penilaian dokumen	Terbatas sampai dengan penetapan penyedia barang dan jasa	

5	SK-DIREKSI	UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf b	<ul style="list-style-type: none"> - Data dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 	- Menghindari persaingan usaha yang tidak sehat	Bilamana dibutuhkan dalam rangka data pendukung penyelidikan kasus hukum oleh aparat penegak hukum	Tidak termasuk Informasi yang Dikecualkan (diluar penguasaan Badan Publik)
	HASIL RUPS					
	AD/ART					
	SOP					
	LHP					
NOTULEN RAPAT						

Menyetujui,
Kepala Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Selaku Atasan PPID Pembantu Setda



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196505041988031014